

## Dewan Sinkronisasi Data BPK

**DEMAK**—Untuk mensinkronkan data dengan BPK, jajaran pimpinan DPRD Demak bersama anggota kemarin (16/6) melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sidak kali ini diawali di Badan Keuangan Daerah (BKD) Demak yang mempertanyakan mengenai pengadaan lima buah LCD sebesar Rp9 miliar lebih. Namun, saat ditanyakan ke BKD ternyata hanyalah salah ketik. Harga lima LCD tersebut sekitar Rp41 juta dan saat ini masih belum didistribusikan.

Menurut Kepala BKD Demak Zuarin, pihaknya mengakui memang terjadi salah pengetikan, dari jumlah yang seharusnya Rp41 juta menjadi Rp9 miliar. Untuk itu pihaknya akan melakukan ko-

reksi atas kesalahan tersebut. “Ada salah pengetikan, dan akan kami perbaiki,” jelasnya.

Sementara itu saat melakukan sidak di gudang obat-obatan milik Dinas Kesehatan, rombongan menemukan stok obat senilai Rp4 miliar di tahun 2014 yang akan digunakan untuk tahun 2015. Menurut Kepala Dinkes dr Iko, untuk pembelian obat memang selalu dilakukan setiap akhir tahun dan digunakan untuk tahun selanjutnya. Seperti untuk tahun 2015 ini pembelian dilakukan di akhir tahun lalu. Setiap obat akan didrop ke setiap Puskesmas yang ada di Demak setiap bulannya agar tidak ada kekurangan obat.

“Mekanismenya memang seperti itu. Pembelian obat

dilakukan setiap akhir tahun dan akan dipakai untuk tahun selanjutnya,” jelasnya.

Mengenai obat yang kadaluarsa, selanjutnya akan dilaporkan ke bagian kekayaan dan kemudian dimusnahkan. Saat di Bapermas KB, dipertanyakan jumlah alat kontrasepsi (alkon) yang nilainya cukup besar, yakni mencapai Rp8,72 miliar.

Candra Wijarko, Kabid KBKR menjelaskan, saat ini Bapermas menyediakan alkon bukan hanya untuk saat ini saja melainkan hingga tiga bulan kedepan. Hal ini mengingat banyaknya peserta KB baru maupun lama yang menggunakannya. Kebijakan tersebut sudah dijalankan sejak lama dengan terus mengisi gudang

dengan alkon baik *droping* dari provinsi maupun menggunakan dana APBD. Contohnya adalah implant yang nilainya mencapai Rp700 juta yang dipergunakan hanya untuk peserta KB baru saja.

Wakil Pimpinan DPRD Demak Slamet Bisri dalam keterangan persnya mengatakan bahwa pihaknya hanya menindaklanjuti LHP BPK saja. “Seperti adanya data tentang persediaan alkon senilai Rp871 juta, apakah sudah sudah didistribusikan atau belum. Juga soal pengadaan LCD senilai Rp9 miliar, yang ternyata salah ketik. Kedepannya akan kami bahas di pansus terkait ketidaksinkronan data tersebut,” jelasnya. **(adi/bow)**